

## Meningkatkan Literasi Keuangan Melalui Belanja Daring

**Achmad Syahruddin\*, Muhammad Akbar, Ibnu Khayath Farisanu**

Prodi Manajemen, STIE Widya Praja Tanah Grogot, Paser

Jl. Jenderal Sudirman No.149, Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

Email: <sup>1,\*</sup>Achmad\_syahr@yahoo.com, <sup>2</sup>akbar.widyapraja@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: Achmad\_syahr@yahoo.com

**Abstrak**—Pandemi Covid-19 telah mempercepat pergeseran menuju dunia yang digital dan memicu perubahan perilaku konsumen menjadi pembelanja daring. Kesamaan perubahan perilaku yang berfokus pada kesejahteraan adalah sama dengan tujuan literasi keuangan. Akan tetapi tingkat literasi keuangan masih rendah. Penelitian ini akan mengungkap tentang salah satu literasi keuangan, sistem pembayaran, yang lazim digunakan saat belanja daring.

**Kata Kunci:** Literasi Keuangan; Belanja Daring

**Abstract**—Covid-19 pandemic has accelerated the shift towards a digital world and triggered changes in consumer behavior to become online shoppers. What we have in common with well-being-focused behavior change is the goal of financial literacy. However, the level of financial literacy is still low. This research will reveal about one of the financial literacy, payment system, which is commonly used when shopping online.

**Kata Kunci:** Financial Literacy; Shopping Online

### 1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung di Indonesia sejak 13 April 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional, hingga hari ini, telah mempercepat pergeseran menuju dunia yang lebih digital dan memicu perubahan perilaku konsumen menjadi gemar belanja secara daring. Survei Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan aktivitas belanja daring sebanyak 31%. (Badan Pusat Statistik, 2020). Sejalan dengan itu, survei yang dilakukan oleh Markplus, Inc menyebutkan pula peningkatan mencapai 28,9% aktivitas belanja produk retail secara daring di masa pandemi Covid-19 ini, meningkat 24,2% dari sebelum masa pandemi Covid-19 yang hanya 4,7% (Markplus.inc, 2020). Data terbaru memperkuat hal ini dimana hasil Survei Penjualan Eceran menunjukkan terjadi peningkatan kinerja penjualan eceran baik secara bulanan maupun tahunan pada April 2021. Indeks Penjualan Riil (IPR) April 2021 tumbuh 17,3% (mtm) dan 15,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1% (mtm) dan -14,6% (yoy). Ini semakin didukung dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2021 yang meningkat menjadi 104,4 dari bulan sebelumnya sebesar 101,5 (Bank Indonesia, 2021a, 2021b). Ini menjadi salah satu indikator penting atas tren pemulihan yang solid dan optimisme ekonomi pasca pandemi (Badan Kebijakan Fiskal, 2021)

Perubahan perilaku “konsumsi dari rumah” melalui belanja daring ini juga berdampak pada perubahan pembelian jenis barangnya. Survei *Future Consumer Index* menemukan fakta bahwa 54% konsumen mengurangi belanja barang mewah dan hiburan/kesenangan. Selain itu 80% konsumen memilih untuk menambah ketimbang berbelanja untuk kehidupan jangka panjang dan 82% lebih sadar pengeluaran (Pratomo, 2021). Kesadaran yang muncul akibat pandemi ini menjadikan 91% konsumen lebih berfokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan. (Hohtoulas et al., 2020).

Fokus kesejahteraan yang menjadi perubahan tujuan konsumen ini, dalam perspektif keuangan, adalah sama dengan tujuan literasi keuangan. Literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Presiden Jokowi menganggap penting peningkatan literasi keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Ekonomi keluarga serta ekonomi mikro dan kecil bisa naik kelas karena dengan peningkatan literasi keuangan akan membantu memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan serta membuka akses dan layanan finansial (presidenri.go.id, 2019).

### 2. METODOLOGI PENELITIAN

#### 2.1 Metode Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur.

## **2.2 Sumber Data**

Sumber data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya.

## **2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dll, maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

## **2.4 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

# **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **3.1 Literasi Keuangan**

Pembahasan tentang literasi keuangan sebagai topik pendidikan berawal di abad ke-20 (Rose, 2021) dan terus berkembang hingga menjadi salah satu literasi dasar yang menjadi visi baru pendidikan di abad ke-21, untuk dapat beradaptasi mengimbangi perkembangan pesat dunia saat ini (World Economic Forum, 2016). Adalah Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menyadari pentingnya literasi keuangan di tahun 2002 dan memulai proyek *International Network on Financial Education* (INFE) di tahun 2008 yang bertujuan meningkatkan pendidikan keuangan dan pengembangan landasan standar literasi keuangan. Literasi keuangan menjadi penting untuk diakui sebagai suatu keterampilan inti dalam menghadapi kompleksitas dunia keuangan. Literasi keuangan didefinisikan sebagai kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu (individual financial well-being) (OECD, n.d.).

Untuk mengukur literasi keuangan, ada tiga dimensi pengetahuan keuangan yang digunakan, yaitu: (1) kemampuan berhitung (seperti menghitung suku bunga), (2) pemahaman keuangan dasar (seperti syarat pembukaan rekening), dan (3) sikap terhadap keputusan keuangan (seperti kepercayaan atas produk asuransi (Carpena & Zia, 2011). Pengetahuan ini kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan lebih rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian. Di Kalimantan Timur, misalnya, literasi keuangan yang dimiliki pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kinerja usaha (Sanistasya et al., 2019). Hasil yang sama berlaku pula untuk literasi keuangan masyarakat. Penelitian di kota Medan menemukan bahwa literasi keuangan yang semakin baik akan memiliki dampak kuat dan nyata terhadap perilaku keuangan masyarakat, juga semakin baik dalam mengelola keuangan yang dapat memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Pulungan, 2017).

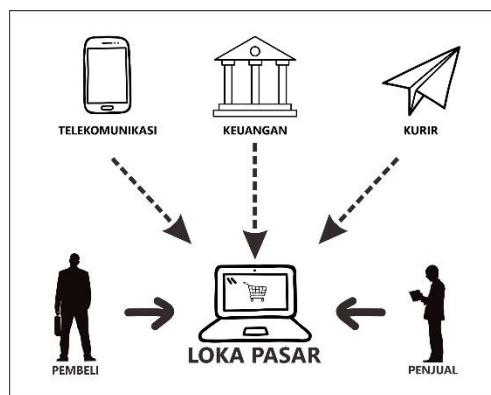
Meskipun literasi keuangan memberikan pengaruh positif dalam kehidupan keuangan, secara umum di Indonesia, tingkat literasi keuangannya tidak seimbang dengan inklusi keuangan . Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, dari 100 orang, ada 76 orang yang mempunyai produk tabungan tetapi hanya 38 orang yang paham tentang keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Dampak dari tingkat literasi yang rendah dapat mengakibatkan: (1) tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik, (2) tidak memiliki tujuan keuangan, (3) menempatkan instrumen investasi yang tidak tepat, dan (4) terjebak oleh praktik investasi bodong (Arviana, 2019).

Selain dari ketimpangan tersebut, di era serba digital saat ini, masalah literasi digital juga menghadapi dua persoalan: (1) pentingnya mendidik konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk dan layanan keuangan baru, dan (2) penggunaan alat untuk memberikan informasi tentang bagaimana memanfaatkan layanan serta produk secara bertanggung jawab. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital memerlukan literasi yang lebih tinggi sebagai efisiensi penggunaan layanan dan, yang terpenting, menghindari kesalahan pembelian produk atau layanan, pencurian data hingga penggunaan data yang tidak sah (Astutik, 2020). Dengan demikian peningkatan kemampuan literasi keuangan harus dipadukan dengan kemampuan literasi digital karena menjadi modal penting bagi konsumen (Intan, 2021b).

## **3.2 Belanja Daring**

Secara sederhana, konsep belanja daring kurang lebih sama dengan konsep belanja secara langsung, dimana pembeli dan penjual bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau jasa. Seiring dengan perkembangan zaman, tempat pertemuan secara fisik kemudian berubah menjadi tempat pertemuan secara maya dalam bentuk digital, yang kemudian dikenal dengan istilah lokapasar daring (*online marketplace*). Perubahan ini pun kemudian melibatkan

berbagai pihak sebagai pendukung dari transaksi yang terjadi, seperti perusahaan telekomunikasi, layanan keuangan, jasa kurir, dan sebagainya, sebagaimana tergambar pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Ilustrasi Belanja Daring

Dalam kondisi pandemi, 82,9% pelaku UMKM merasakan dampak negatifnya, hanya 5,9% yang merasakan dampak positif. Ini menyebabkan 63,9% pelaku UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Beragam cara dilakukan untuk bertahan di masa pandemi ini salah satunya dengan memanfaatkan teknologi internet. Namun, banyak pelaku UMKM tidak sepenuhnya siap untuk serta merta beralih ke digital, tercatat hanya 34% yang menggunakan internet untuk memasarkan produk melalui lokasar (Katadata Insight Center, 2020). Hal ini disadari oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) sehingga berusaha mendorong UMKM untuk memperluas pasar melalui digitalisasi. Dari total populasi UMKM di Indonesia, hanya 12,1 juta atau 19% UMKM yang terhubung dalam ekosistem digital. Salah satu cara untuk mengakselerasi UMKM *Go Digital* adalah dengan meningkatkan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha (Suryowati, 2021). Pemerintah menargetkan di 2024, jumlah UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital meningkat pesat mencapai 30 juta UMKM (kemenkopukm.go.id, 2021).

Dalam kaitannya dengan literasi keuangan, tulisan ini akan membahas tentang sistem pembayaran yang berlaku terutama ketika melakukan belanja daring. Secara umum, sistem pembayaran diatur oleh Bank Indonesia, yang bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Peraturan yang baru dirilis diakhir Desember 2020 dikeluarkan karena perkembangan digitalisasi dan inovasi sistem pembayaran yang meningkatkan efisiensi industri sistem pembayaran dan percepatan inklusi ekonomi dan keuangan digital.

Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran (medium of change) atau intermediary dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Tahapan proses transaksi pembayaran meliputi kegiatan: (1) pratransaksi, (2) inisiasi, (3) otorisasi, (4), kliring, (5) penyelesaian akhir, dan (6) pascatransaksi. Lebih detail penjelasan tentang kegiatan proses transaksi dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah.

		PRATRANSAKSI → [ INISIASI → OTORISASI → KLIRING → PENYELESAIAN AKHIR ] → PASCATRANSAKSI
Pratransaksi	Kegiatan awal yang dilakukan untuk memulai pemrosesan transaksi pembayaran, antara lain menyeleksi konsumen, pencetakan kartu, personalisasi kartu, penyediaan informasi sumber dana dan penyediaan infrastruktur seperti terminal atau <i>reader</i> .	
Inisiasi	Kegiatan untuk menginisiasi perintah atau instruksi perpindahan dana melalui alat, media, dan/atau seperangkat prosedur, dengan metode atau penggunaan teknologi tertentu dalam transaksi pembayaran untuk dilanjutkan dengan kegiatan penerusan data transaksi pembayaran dan otorisasi.	
Otorisasi	Persetujuan atas transaksi setelah dilakukan kegiatan penerusan transaksi pembayaran yang dilakukan dengan cara: melakukan verifikasi atau otentifikasi identitas pemilik sumber dana yang melakukan transaksi pembayaran; melakukan validasi atas akses ke sumber dana dan transaksi pembayaran yang dilakukan, dan memastikan kecukupan sumber dana.	
Kliring	Proses yang dilakukan setelah terjadinya transaksi pembayaran, yang mencakup kegiatan merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban para pihak, yang menunjukkan posisi akhir hak dan kewajiban para pihak sebelum penyelesaian akhir ( <i>settlement</i> ) dilakukan	
Penyelesaian Akhir	Kegiatan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat melalui pendebitan dan pengkreditan akun para pihak atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran berdasarkan hasil kliring	

Pascatransaksi	Kegiatan setelah penyelesaian akhir ( <i>settlement</i> ) transaksi pembayaran selesai dilakukan, seperti pencetakan lembar tagihan atas transaksi yang telah selesai dilakukan dan penyampaian data dan/atau informasi atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan Pengguna Jasa.
----------------	---

**Gambar 2.** Proses Transaksi Pembayaran

Secara umum, instrumen yang digunakan dalam belanja daring ada dua jenis: (1) Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), seperti kartu kredit atau kartu ATM/Debet, dan (2) Uang Elektronik. Perbedaan utama APMK antara kartu kredit dengan kartu ATM/Debet adalah sumber dana yang digunakan. Kartu kredit menggunakan sumber dana dari penerbit kartu yang kemudian pemegang kartu melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik pelunasan sekaligus (*charge card*) ataupun pembayaran secara angsuran, sedangkan kartu ATM/Debet menggunakan sumber dana dari simpanan pemegang kartu pada bank. Untuk penerbitan uang elektronik didasarkan pada uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit untuk kemudian disimpan secara elektronik ke dalam suatu media server atau chip, dan bukan dianggap sebagai simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.

Selain menggunakan kartu, kanal dan layanan pembayaran yang sesuai dengan kemajuan teknologi juga lazim digunakan, seperti:

- a) QR *Code Indonesia Standard* (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Saat ini, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh tempat yang berlogo QRIS, meskipun menggunakan penyelenggara QRIS berbeda-beda.
- b) Dompet Elektronik adalah layanan elektronik penyimpanan data instrumen pembayaran yang dapat menampung dana paling banyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), hanya untuk pembayaran transaksi belanja dan tagihan. Penarikan dana hanya dapat dilakukan dengan transfer ke rekening simpanan pengguna di bank yang telah daftarkan atau menarik secara tunai dalam rangka *redeem*.
- c) *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memroses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*.
- d) *Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.
- e) *Proprietary Channel* adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service*, *mobile*, *web*, *subscriber identity module tool kit*, dan/atau *unstructured supplementary service data*.

Untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, infrastruktur yang disediakan oleh Bank Indonesia, antara lain:

- a) BI FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara *real time* dan 24/7.
- b) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memroses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan regular.
- c) Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau *National Payment Gateway* (NPG) adalah sistem yang terdiri atas *Standar*, *Switching* dan *Services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
- d) BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Ini merupakan pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp.100 juta ke atas dan bersifat segera (*urgent*). (www.bi.go.id, n.d.-a)

Yang harus menjadi kehati-hatian dalam transaksi pembayaran adalah banyaknya aksi penipuan dalam beragam modus, seperti Mama Minta Pulsa yang sempat marak dan meresahkan masyarakat (Mei, 2015) sampai yang tercanggih dengan meminta kode One Time Password (OTP) (Salsabila, 2020). Untuk itulah, perlu kecermatan dan ketelitian agar tidak terjerumus menjadi korban penipuan, diantaranya:

- a) Menjaga informasi pribadi dengan tidak sembarang memberikan kepada instansi atau orang lain yang diragukan kebenarannya. Informasi pribadi ini termasuk nama lengkap, nomor telepon, alamat, nomor identitas, nomor rekening, nomor kartu kredit/debet, dan sejenisnya. Termasuk juga tidak sembarangan mengirim swafoto dengan KTP atau kartu bank karena ini bisa disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman bodong misalnya.
- b) Jangan memberikan kode OTP kepada siapapun dengan alasan apapun. Instansi resmi pun tidak akan meminta kode OTP tersebut karena kode OTP ini merupakan validasi atas suatu tidak tertentu.
- c) Jangan mudah tergiur dengan hadiah atau keuntungan yang ditawarkan. Lakukan penggalian informasi tambahan dari sumber yang lebih terpercaya.
- d) Jangan mentransfer ke rekening penipu yang mengatasnamakan orang pribadi, bukan instansi atau lembaga resmi..
- e) Hanya percaya informasi dari sumber resmi, baik melalui sosial media, laman resmi, atau langsung ke kantor terdekatnya. (Intan, 2021a)

## 4. KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 memberi dampak perubahan dalam pola kehidupan masyarakat dengan memaksa percepatan digitalisasi ke banyak hal, termasuk dalam cara belanja yang dilakukan secara daring. Ini menuntut kemampuan perubahan perilaku untuk lebih melek terhadap literasi keuangan dan digital. Kedua literasi ini saling melengkapi satu sama lain karena tuntutan teknologi masa kini dan mendatang. Terutama bagi pelaku UMKM, kemajuan teknologi ini merupakan anugerah untuk memperbesar kesempatan mengakses pasar yang luas secara lebih mudah.

## REFERENCES

- Arviana, G. N. (2019, August 29). *Ini Empat Akibat Jika Literasi Keuangan Rendah*. <https://finansial.bisnis.com/read/20190829/55/1142469/ini-empat-akibat-jika-literasi-keuangan-rendah>
- Astutik, Y. (2020, August 24). *Ada 2 Masalah di Balik Literasi Keuangan Digital RI*. 1–2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200824170208-4-181599/ada-2-masalah-di-balik-literasi-keuangan-digital-ri>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Tahun 2021 Menguat*. Kementerian Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/pressrelease/2021/Siaran Pers Pertumbuhan Kurtal 1 Tahun 2021.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Hasil Survey Sosial Demografi Dampak Covid-19 Tahun 2020*. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NjY5Y2IyZTg2NDY3ODdlNTJkZDE3MWM0&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjAvMDYvMDEvNjY5Y2IyZTg2NDY3ODdlNTJkZDE3MWM0L2hhc2lsLXN1cnZlaS1zb3NpYWwtZGVtb2dyYWZpLWRhbXBhay1jb3ZpZC0xOS0yMDIw>
- Bank Indonesia. (2021a). *Survei Konsumen Mei 2021: Optimisme Konsumen Terus Menguat* (Issue 9 Juni). [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK\\_Mei\\_2021.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK_Mei_2021.pdf)
- Bank Indonesia. (2021b). *Survei Penjualan Eceran April 2021: Penjualan Eceran Meningkat* (Issue 10 Juni). [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2314021.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2314021.aspx)
- Carpena, F., & Zia, B. (2011). Unpacking the Causal Chain of Financial Literacy. In *The World Bank Development Research Group* (Issue September). World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/329301468322465624/pdf/WPS5798.pdf>
- Hohtoulas, P., Phan, A. T., Mheen, P. van de, Kwan, E., & Kwan, E. (2020). *Consumer Insights Survey 2020 - An Indonesian Perspective: Before and After the COVID-19 Outbreak*. <https://www.pwc.com/id/en/consumer-industrial-products-services/indonesia-gcis-2020-placemat.pdf>
- Intan, N. (2021a, May 13). *5 Hal Agar Terhindar dari Modus Penipuan Digital*. <https://www.republika.co.id/berita/qsugkg383/5-hal-agar-terhindar-dari-modus-penipuan-digital-part1>
- Intan, N. (2021b, May 28). *OJK Padukan Literasi Keuangan dan Literasi Digital Konsumen*. <https://www.republika.co.id/berita/qtrleo423/ojk-padukan-literasi-keuangan-dan-literasi-digital-konsumen>
- Katadata Insight Center. (2020). *Status Literasi Digital Indonesia 2020: Hasil Survei di 34 Provinsi* (Issue November). [https://katadata-s3-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/media/kic/kominfo/Status Literasi Digital\\_Nasional.pdf](https://katadata-s3-public.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/media/kic/kominfo/Status Literasi Digital_Nasional.pdf)
- Kemenkopukm.go.id. (2021, June 10). *Pemerintah Targetkan 30 Juta Pelaku UMKM Tergabung Dalam Ekosistem Digital Pada 2030*. <https://kemenkopukm.go.id/read/pemerintah-targetkan-30-juta-pelaku-umkm-tergabung-dalam-ekosistem-digital-pada-2030-1623422657>
- Markplus.inc. (2020). Surviving the Covid-19 , Preparing The Post - Retail Perspective. In *Surviving the covid-19 preparing the post*. <http://www.markplusinc.com/wp-content/uploads/2020/06/IRT-14-MarkPlus-Industry-Roundtable-Roundup-Retail-Perspective.pdf>
- Mei, A. R. (2015). *Ini Modus-modus Penipuan "Mama Minta Pulsa" yang Perlu Diwaspadai*. <https://news.detik.com/berita/d-3069729/ini-modus-modus-penipuan-mama-minta-pulsa-yang-perlu-diwaspadai>
- OECD. (n.d.). *International Gateway for Financial Education - Organisation for Economic Co-operation and Development*. International Network on Financial Education. Retrieved June 19, 2021, from <https://www.oecd.org/financial/education/oecd-international-network-on-financial-education.htm>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). In *Otoritas Jasa Keuangan*. Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. [\(Revisit 2017\)-new.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-(Revisit-2017)-SNLKI)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019. In *Survey Report*. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Pratomo, Y. (2021). *Menakar Perilaku Konsumen Indonesia Pasca-Pandemi Covid-19*. IDX Channel. <https://www.idxchannel.com/economics/menakar-perilaku-konsumen-indonesia-pasca-pandemi-covid-19>
- presidenri.go.id. (2019). *Presiden Jokowi : Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat*. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-dorong-literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat/>
- Pulungan, D. R. (2017). Literasi Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(1), 56–61. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i1.1180>
- Rose, S. (2021). *The History of Financial Literacy*. <https://www.opploans.com/oppu/articles/history-of-financial-literacy/>
- Salsabila, P. Z. (2020, September 24). *Alasan Orang Indonesia Sering Jadi Korban Penipuan lewat Modus OTP*. <https://tekno.kompas.com/read/2020/09/24/20320087/alasan-orang-indonesia-sering-jadi-korban-penipuan-lewat-modus-otp>
- Sanistasya, P. A., Raharjo, K., & Iqbal, M. (2019). The Effect of Financial Literacy and Financial Inclusion on Small Enterprises Performance in East Kalimantan. *Jurnal Economia*, 15(1), 48–59. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23192>
- Suryowati, E. (2021, June 7). *Baru 19 Persen UMKM Terhubung Ekosistem Digital, PR bagi Teten Masduki*. <https://www.jawapos.com/ekonomi/07/06/2021/baru-19-persen-umkm-terhubung-ekosistem-digital-pr-bagi-teten-masduki/?page=all>
- World Economic Forum. (2016). New Vision for Education : Fostering Social and Emotional Learning through Technology. In *World Economic Forum* (Issue March). [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_New\\_Vision\\_for\\_Education.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf)